

Laporan Studi Lapangan :

Pendalaman

Memperkuat Sendi- sendi Kesatuan Bangsa melalui Spirit Multikulturalisme

Oleh : Tim Redaksi



Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir demokratisasi di Indonesia terus bergulir merasuk ke berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pergerakannya terus mengalami kemajuan meskipun di sana sini masih terkesan lamban. Boleh jadi semua itu sebagai konsekuensi logis dari posisi Indonesia yang masih dalam kategori Negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. Proses dari transisi demokrasi menuju Negara yang benar-benar masuk kategori Negara demokratis tidaklah semudah yang dibayangkan. Bahkan proses itu akan terancam gagal jika tidak ada upaya menambah energi untuk mendorong percepatan menuju Negara yang benar-benar demokratis.

Hingga fase perkembangannya sekarang, masih banyak yang menilai bahwa demokrasi kita masih berada pada taraf prosedural, dan belum bisa dikatakan sebagai demokrasi substansial. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab lambannya proses demokratisasi di segala bidang, antara lain belum efektifnya partai politik dalam menjalankan fungsinya, kesejahteraan sosial ekonomi yang masih rendah, dan tingkat pendidikan yang belum merata. Di samping itu budaya politik elite yang cenderung memapankan struktur patrimonialistik, masih cukup kuat sebagai ekspresi ketidakrelaan membuka akses politik dan ekonomi bagi rakyat banyak, juga menjadi salah satu kendala percepatan proses demokrasi yang lebih substansial.

Boleh jadi karena masih sedang dalam suasana euphoria demokrasi, reaksi yang terjadi di berbagai daerah justru lebih mengedepankan karakteristik yang kurang produktif bagi upaya membangun masyarakat yang multikultural. Penerapan Otonomi Daerah misalnya, menjadi medium bagi daerah untuk lebih menonjolkan primordialisme, seperti isu putra daerah yang menjadi dasar dalam memilih pemimpin. Perbedaan identitas yang berlandaskan primordialistik seperti itu mengindikasikan bahwa sendi-sendi utama dalam membangun masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural berada pada situasi problematik.

Bersamaan dengan itu, praktik politik identitas juga semakin menguat yang sedikit banyak juga dipolitisir oleh kalangan elite lokal. Bahkan

di beberapa daerah pergulatan tarik-menarik kepentingan antarelite lokal itu membawa kepada situasi konflik yang berlatar belakang etnis dan bahkan agama. Penebalan identitas yang dibangun di atas isu lokal dipandang efektif bagi kepentingan elite lokal dalam mengambil kekuasaan. Akibatnya multikulturalisme menjadi paham yang hanya terasa pada level normatif, sedangkan pada praktik sosial-politik masih belum terasa gaungnya. Oleh karena itu tidak terlalu mengherankan jika belakangan ini simbol-simbol negara dan simbol-simbol kebangsaan semakin kurang populer.

Realitas empirik menunjukkan bahwa sejak era yang disepakati sebagai era reformasi, berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik, anarkisme massa, dan intoleransi sosial terus terjadi mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem politik demokrasi yang menjadi pilihan pasca Orde Baru, ternyata masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap upaya kesejahteraan rakyat, sehingga konflik-konflik sosial politik terus menggejala. Berangkat dari latar belakang itu, Tim Redaksi telah menelusuri ke berbagai daerah, untuk mengetahui lebih jauh persoalan di seputar kebangsaan dari perspektif multikulturalisme.

> --- Palu: Sosialisasi Multikulturalisme

Pada prinsipnya masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya memiliki kohesivitas sosial yang kuat, karena secara sosiologis memiliki karakter menonjol sebagai masyarakat agraris. Ikatan-ikatan komunalisme masih terasa kuat yang bersumber dari nilai-nilai kekeluargaan. Paham bahwa kita adalah teman atau saudara masih menjadi landasan utama dalam melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu, secara tradisional, masyarakat Palu masih memiliki potensi kuat sebagai masyarakat yang terintegrasi. Kalau toh dalam sepuluh tahun terakhir ini Palu serin g terjadi konflik sosial berlatar belakang isu SARA,

dapat dikatakan lebih karena masalah politik.

Sebagaimana dikatakan Samsuddin Radja, guru besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu, konflik yang terjadi selama ini lebih merupakan masalah politik. "Konflik di Poso misalnya, pada hakekatnya itu bukan konflik agama, tetapi konflik politik yang bersumber dari kepentingan elite politik" katanya. Masyarakat Poso sendiri secara sosiologis tidak memiliki potensi konflik, karena merupakan masyarakat komunal yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat. Hanya saja harus diakui bahwa pasca pemerintahan Orde Baru, situasi hubungan sosial antarwarga semakin dipenuhi rasa saling curiga. Terlebih lagi setelah era reformasi sekarang ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi, sehingga dalam mengartikulasikan kepentingannya kadang-kadang anarkis.

Sebagai contoh kasus Buol di Sulawesi Tengah, di satu sisi aparat keamanan kurang sigap dan terlalu reaktif, sementara massa dalam menyampaikan aspirasinya kurang menjunjung etika demokrasi, sehingga timbul peristiwa kerusuhan masif yang memakan korban jiwa. Menurut Samsuddin Radja dan Saiffulah Bombang, dosen STAIN Palu, jika aparat kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dialog, kerusuhan tersebut tidak akan terjadi. Meski harus diakui bahwa warga masyarakat sering melakukan tindakan yang menjerus anarkis, tetapi jika aparat bersedia menahan diri dan membuka dialog, biasanya massa dapat dikendalikan. Penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan kultural seharusnya lebih dikedepankan oleh jajaran aparat keamanan. Oleh karena itu, paham multikulturalisme seyogyanya juga disosialisasikan bukan saja kepada masyarakat, tetapi juga pada segenap jajaran aparat kepolisian.

Tentang pentingnya sosialisasi multikulturalisme itu disampaikan juga oleh Lukman S. Thahir, Rektor Universitas Islam Al Chairat. Multikulturalisme merupakan sesuatu yang harus disosialisasikan terus menerus, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karakter bangsa ini yang beranekaragam. Keragaman budaya, agama, dan etnik, sekarang ini cenderung dikedepankan aspek perbedaannya, sehingga mengakibatkan merosotnya wawasan kebangsaan. Ada kecenderungan masing-masing etnik

itu mulai memunculkan egonya masing-masing, dan masing-masing budaya juga memperlihatkan arogansinya, yang mengakibatkan orientasi kebangsaan kita bergeser ke arah yang keliru, sehingga bisa mengancam disintegrasi bangsa dan bisa mengakibatkan merosotnya nilai-nilai kebangsaan kita. Karena itu multikulturalisme yang menjadi bagian kita itu betul-betul harus dikemasi dengan sebaik-baiknya yang kemudian bisa memunculkan keragaman itu adalah sebuah mutiara yang harus dijaga. "Munculnya konflik-konflik bernuansa SARA sebagaimana yang belakangan sering muncul di Palu dan Poso misalnya, jelas merupakan ancaman bagi disintegrasi bangsa", tegas Lukman. Oleh karena itu paham multikulturalisme harus benar-benar diinternasionalisasikan melalui suatu paket program yang dikemas dengan baik pada berbagai aktivitas. Misalnya, sekarang harus ada upaya revitalisasi konsep kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa. Para pemimpin dan elite politik perlu terus melakukan interpretasi baru terhadap nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan era demokratisasi sekarang ini. Pancasila adalah sumber utama multikulturalisme jika benar-benar ingin membangun bangsa Indonesia yang plural. "Kalau Pancasila tidak disentuh kembali, maka masing-masing akan menonjolkan perbedaannya. Bahkan agama yang satu dengan lainnya bisa mengklaim dirinya paling hebat", kata Lukman menambahkan.

Menyinggung masalah agama yang sering menjadi sumber konflik, menurut Lukman, karena ada sebagian anggota masyarakat yang pemahamannya terlalu normatif-tekstual. Cara pemahaman seperti itu akan membuat merasa paling benar, dan dengan cepat menyalahkan pihak lain, sehingga sikap dan cara beragamanya cenderung eksklusif. Pemahaman agama seperti itu kontra produktif dengan prinsip berbangsa yang berlandaskan multikulturalisme. Pada pemahaman agama yang lebih substantif, kontekstual, dan inklusiflah menurut Lukman yang akan sesuai dengan paham multikulturalisme.

Sementara itu berkaitan dengan politik pemerintahan di era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, Lukman mengakui bahwa di Palu pemerintah sering bersikap ambigu. Di satu sisi Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan



yang dilandasi multikulturalisme, tetapi tidak sedikit kenyataan menunjukkan adanya praktik primordialisme-kedaerahan. Sebagai ilustrasi, misalnya, pada era Otonomi Daerah sekarang ini harus diakui bahwa sentimen putra daerah tetap terasa kuat dalam berbagai kebijakan pemerintah. Akibatnya terjadi ironi demokrasi, ketika Otonomi Daerah yang seharusnya mengedepankan prinsip kesamaan, tetapi kenyataannya prioritas tetap putra daerah. Lukman menekankan, di masa depan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan harus menggunakan prinsip multikulturalisme. Artinya, dalam setiap kebijakan pemerintah, harus melibatkan segenap unsur masyarakat dengan tidak memandang latar belakang agama, etnis, golongan, dan sifat kedaerahan.

Suara senada juga datang dari Ikhwam, Kepala Bidang Wawasan dan Ketahanan Bangsa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menegaskan bahwa potensi konflik horisontal dan vertikal akan terus ada jika tidak diantisipasi dengan baik. Ancaman disintegrasi bangsa akan semakin menguat jika kebijakan pemerintah tidak berlandaskan pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, yaitu kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara penuh keanekaragaman. Untuk itu, Ikhwam menganjurkan bahwa sekarang ini bagaimanapun mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila tetap perlu, agar wawasan kebangsaan tetap berkembang dalam alam pikiran warga negara. Tentu saja model sosialisasinya tidak lagi bersifat indoktrinatif seperti Penataran P4 pada era Orde Baru, tetapi lebih dikemas sebaik mungkin sesuai dengan era demokrasi.

Di samping itu, untuk menyuburkan semangat multikulturalisme, perlu mengambil nilai-nilai budaya lokal. Di Sulawesi ini ada kearifan lokal seperti semboyan, *sintivu maroso*, yang artinya, kebersamaan dalam ikatan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian pula dengan semboyan *Mostamasei* yang artinya, saling tolong-menolong, saling melindungi, dan saling menghargai. Nilai-nilai budaya yang sarat dengan kearifan lokal semacam itu sangat efektif digunakan untuk membangun masyarakat multikultural yang mengedepankan toleransi, gotong-royong, dan kekeluargaan dalam arti luas.

> --- Mataram: Ada Ego-kultural

Era reformasi yang dimaknai sebagai era serba bebas dan euforia demokrasi membuat situasi masyarakat di Kota Mataram, dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya menjadi sering dilanda konflik horisontal. Meski tidak berlatar belakang agama dan etnis, tetapi di wilayah ini sering terjadi konflik horisontal yang melibatkan tawuran antarkampung, antargeng, dan sesekali antarpendukung simpatisan politik dalam Pemilu Kepala Daerah. Unjuk rasa pun sering terjadi dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka mengartikulasikan kepentingannya.

Menurut Ridwan Hidayat, Kepala Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri, Provinsi NTB, maraknya konflik horisontal tersebut disebabkan karena pemaknaan terhadap demokrasi yang kebablasan. Lebih repot lagi ekspresi dalam berdemokrasi itu sering kali atas nama Hak Asasi Manusia, yang sebenarnya salah dalam melihat pengertian HAM tersebut. Seharusnya demokrasi harus diletakkan dalam koridor *rule of the game* dan *rule of law*, dalam arti masyarakat dalam berdemokrasi harus taat aturan dan etis. "itu semua merupakan manifestasi berdemokrasi yang kebablasan, karena warga masyarakat keliru dalam memberikan makna konseptualisasinya," kata Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan bahwa konflik-konflik horisontal yang terjadi di NTB disebabkan oleh empat faktor, yaitu kesenjangan sumber daya manusia, diskriminasi ego kultural, dan eksklusivisme. Ketidakseimbangan SDM itu biasanya tercermin pada penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli biasanya memiliki SDM yang rendah, terutama karena tingkat pendidikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk pendatang. Penduduk asli daerah yang umumnya mayoritas akan bersikap sensitif jika muncul ketidakadilan sehingga mudah memicu konflik. Kebijakan yang diskriminatif sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik, terutama jika yang merasa dirugikan adalah penduduk asli daerah. Sedangkan ego kultural sangat sering memicu konflik sosial seperti etnis minoritas (umumnya pendatang) yang bersikap arogan atau berperilaku berlebihan.

akan dengan cepat menyinggung penduduk asli daerah. Sementara penduduk asli daerah tersebut kurang mengembangkan sikap toleran, sehingga memicu konflik. Adapun faktor eksklusivisme ini umumnya ditunjukkan oleh perilaku beragama yang bersifat eksklusif sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalangan agama sektarian.

Abdurrahman, Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Mataram, mengatakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah penerapan UU No. 32 tentang Otonomi Daerah yang cenderung menyuburkan sifat kedaerahan. Sikap primordialisme di era Otonomi Daerah ini harus diakui berpotensi mengikis wawasan kebangsaan. Pertimbangan profesionalisme sering diabaikan ketika dalam menempatkan sumber daya manusia, karena faktor putra daerah. Dalam Pimilu Kepala Daerah misalnya, geneologi daerah ini terasa sangat dominan, sehingga mengusung isu putra daerah. Identitas tidak dimaknai sebagai sesuatu yang cair, tetapi mengkristal dan tunggal identik dengan putra daerah. Situasi itu jelas bertentangan dengan semangat multikulturalisme.

Nuansa putra daerah itu sangat dirasakan oleh Teguh Raharjo, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri I Mataram, yang kebetulan berasal dari Jawa. Sebelum era reformasi, penerimaan penduduk asli terhadap kaum pendatang sangat kuat, tetapi setelah era reformasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, dominasi penduduk asli terasa kuat, terutama di bidang politik. Sering saya merasakan adanya subyektivitas kepemimpinan yang bias kedaerahan, sehingga mengabaikan kualitas dan profesionalisme. "Saya kira persepsi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, di NTB ini menggunakan pandangan yang sempit dan mengurangi makna wawasan kebangsaan", ujarnya prihatin.

Dalam hal konflik yang bernuansa SARA, hampir semua informan mengatakan bahwa di NTB tidak ada. Akan tetapi potensi ke arah itu tetap ada.

Akan tetapi yang jauh lebih memprihatinkan adalah bahwa merosotnya wawasan kebangsaan ini menurut Nasir adalah pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai keutamaan budaya timur. Hilangnya nilai gotong-royong misalnya, ini merupakan akibat pengaruh budaya luar

yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. "Pemerintah kurang peduli terhadap pudarnya nilai lokal semacam itu. Apalagi elite politik, mereka hanya sibuk berpolitik praktis dan kurang peduli daengan memudarnya wawasan kebangsaan", katanya.

Pancasila pun menurut Natsir sudah sangat kehilangan vitalitasnya dalam membangun masyarakat plural. "Jangankan warga masyarakat biasa, pemerintah sendiri sekarang ini sudah tidak pernah menyinggung-nyinggung Pancasila sebagai acuan berbangsa. Orang semakin berpikir sektarian, dan semakin banyak pejabat yang tidak bisa menghafal sila Pancasila. Seharusnya nilai-nilai Pancasila mulai dibangun lagi sebagai landasan berbangsa dan menjadi sumber multikulturalisme", tegasnya. Lebih lanjut Natsir mengatakan bahwa sebenarnya ada kebijakan pemerintah daerah yang berwawasan multikulturalisme, tetapi pada implementasinya tidak jalan, karena terbentur kepentingan sempit. Setiap kebijakan sering terasa bias kepentingan kelompok, bahkan sekarang di NTB muncul isu akan di Nahdlatul Wathan-kan.

Sementara itu, Made Renjani, Ketua Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia NTB, mengakui bahwa wawasan kebangsaan sekarang mulai surut. Sejak UUD 1945 diamandemen, ada potensi Indonesia bisa mengabaikan semangat multikulturalisme. "Pancasila harus direvitalisasi untuk meningkatkan semangat multikulturalisme dalam berbangsa, sehingga efektif sebagai perangkat bangsa. Artinya, kalau orang Hindu ya Hindu yang Indonesia, kalau Islam ya Islam yang Indonesia", katanya.

Hampir semua informan setuju bahwa untuk meningkatkan semangat berbangsa dalam bingkai NKRI, maka multikulturalisme adalah mutlak. Untuk itu mereka sepakat bahwa nilai-nilai budaya lokal perlu dikedepankan sebagai upaya membangun toleransi. Sentuhan lokal ini akan menjadikan nilai universalisme yang berasal dari luar baik itu agama maupun budaya luar yang bersifat ekspansif, akan dapat tampil lunak jika mendapat sentuhan budaya lokal yang sarat kearifan.



> --- Surabaya: Kultur Keterbukaan dan Egaliter

Mencermati perkembangan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya, tidak bisa dilepaskan dengan basis kultur yang menjadi faktor determinan dalam menjalin hubungan sosial. Sub-kultur surabayan yang memiliki karakter terbuka dan egaliter adalah modal kultural yang signifikan sebagai fondasi membangun sistem sosial yang terintegrasi. Modal kultural itulah yang selama ini menjadi ikatan kuat masyarakat Surabaya yang meskipun beragam tetapi tetap kuat kohesivitas sosialnya.

Potensi konflik yang berlatar belakang etnis, agama, dan bahkan ras di Surabaya tetap ada, akan tetapi selama ini tetap bersifat laten, tidak pernah manifes apalagi eksplisit seperti di Ambon atau Poso misalnya. Salah satu faktor penting menjaga hubungan sosial yang harmonis masyarakat Surabaya, menurut Mustain, guru besar Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, adalah terjeganya kultur keterbukaan dan sikap egalitarian warga Surabaya. "Arek Surabaya memiliki sikap terbuka, dalam arti apa adanya, tidak pernah basa-basi, dan humoris. Kesenian rakyat seperti Ludruk misalnya, adalah cermin betapa hubungan populis dan egaliter berhasil dibangun lewat struktur cerita", katanya.

Masyarakat Surabaya pada prinsipnya kurang menunjukkan karakter sebagai masyarakat yang patriomonalistik. Hubungan antara pemimpin dan rakyat misalnya, tidak berlangsung secara formal, tetapi bisa berjalan secara egaliter. Di wilayah ini Wali Kota, Gubernur, atau Bupati bisa berdialog secara santai dan penuh canda dengan warga masyarakat. Sapaan akrab seperti "*yok opo kabare rek*" senantiasa mewarnai dalam komunikasi sosial. Bahkan sapaan yang terasa kasar seperti "*jancuk*" (seperti umpatan), tetapi bisa bermakna keakraban dan keeratan hubungan emosional antarwarga.

Menurut Mustain memang konflik sosial selalu ada, terutama yang berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan, baik yang ditujukan pada pemerintah lokal maupun di kalangan buruh industri. Akan tetapi semua itu lebih merupakan ungkapan aspirasi yang bersifat wajar, dan

jarang sekali menjurus pada konflik sosial yang masif dan ideologis. Kuatnya solidaritas sosial warga Surabaya yang berbasis kultur egalitarian, sering kali efektif untuk menjadi gerakan sosial dan politik. Surabaya yang memperoleh sebutan sebagai kota pahlawan, merupakan indikator bahwa semangat kesetiakawanan sosial itulah yang menjadi modal kuat bagi upaya perjuangan rakyat dalam mengusir penjajah.

Sekarang ini kesenjangan sosial cukup lebar, terutama antara kalangan etnis Tionghoa dengan warga lainnya, katakanlah pribumi. Kesenjangan itu tampak jelas tercermin dari mulai gaya hidup, pemukiman, hingga penumpukan akses ekonomi. Akan tetapi menurut Mustain, kesenjangan sosial ini meskipun memiliki potensi konflik, tetapi selama ini tidak pernah meledak seperti yang terjadi di Solo atau Jakarta. "Mengapa konflik berlatar belakang etnis tidak terjadi, karena kultur surabayan yang egaliter, terbuka, dan humoris, masih efektif berfungsi sebagai integrasi sosial", ungkap Mustain.

Sementara itu dalam kehidupan beragama, hampir dikatakan tidak pernah terjadi konflik di wilayah ini. Corak keberagaman warga Surabaya dapat dikatakan bersifat inklusif dan bahkan mendapat sentuhan lokal. Jawa Timur merupakan basis dari warga umat Islam yang bernaung dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal dengan kaum Nahdliyin. Umat Islam yang sering disebut juga sebagai Islam tradisional dan ada juga yang menyebut sebagai Islam kultural, merupakan Islam yang akomodatif dan bahkan memeliharanya terhadap hal-hal yang bersifat tradisional dan kultural. Salah satu tokoh utama umat NU, Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur, adalah pemikir yang mengagas konsep pribumisasi Islam.

Oleh karena itu, dengan latar belakang Islam kultural seperti itu, warga Surabaya, dan Jawa Timur pada umumnya, memiliki toleransi tinggi terhadap umat agama lain. Lebih dari itu, berbagai aliran Islam radikal praktis kurang begitu mendapat pengikut di wilayah ini. "Agak sulit aliran Islam radikal dan eksklusif mendapatkan simpati di Surabaya, karena mayoritas Islam di sini adalah warga Nahdliyin yang kurang simpatik terhadap kelompok Islam eksklusif", kata Abdul Hamid, dosen Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya.

Menurut Hamid, kerukunan umat beraga di Surabaya bukan sekadar di forum-forum formal atau di panggung serimonial, tetapi telah menjadi praksis sosial. Jika hari besar agama, seperti Idul Fitri dan Natal misalnya, sudah merupakan hal biasa di antara umat beragama saling menghormati yang diwujudkan dalam bentuk saling bantu-membantu ketika merayakan hari besar agama. "Umat Kristiani biasa menjadi panitia Syawalan, dan sebaliknya umat Islam juga sering terlibat dalam kepanitian peringatan Natal", kata Hamid menjelaskan.

Sedangkan Soetomo, mantan Ketua Golkar Jawa Timur, memberikan penjelasan dari sudut politik. Warga Surabaya sebagian besar adalah warga nasionalis, karena itu partai-partai beraliran nasionalis, seperti PDI-P, Golkar, dan Partai Demokrat selalu memperoleh dukungan signifikan di daerah ini. Warga nasionalis memiliki toleransi tinggi terhadap kehidupan beragama, dan senantiasa mendukung paham multikulturalisme. Ideologi Pancasila merupakan harga mati bagi kaum nasionalis, karena itu akan senantiasa menentang usaha-usaha politik yang menghendaki Indonesia sebagai negara Islam. "Bagi warga nasionalis, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah harga mati", tegas Soetomo.

Hanya saja Soetomo mengakui bahwa Pancasila sekarang kurang mendapat perhatian, atau paling tidak mengalami masa surut di tengah kehidupan sosial dan politik. Para elite politik jarang mengusung ideologi Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. "Elite politik sekarang ini kurang mempunyai landasan ideologis ketika menghadapi persoalan bangsa. Mereka lebih suka menggunakan pemikiran pragmatis ketika menyusun sebuah program. Lihat saja misalnya, sekarang ini yang populer kan soal visi-misi ketika akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan. Seharusnya harus ada *grand design* yang jelas, misalnya seperti GBHN, dan menggunakan landasan ideologi Pancasila sebagai pedoman utama program pemerintah. Elite politik semakin jarang menyebut Pancasila untuk menyusun program", kata Soetomo.

> --- Samarinda: Semangat Multikulturalisme Perlu Digalakkan

Masyarakat Samarinda, dan Kalimantan Timur pada umumnya merupakan masyarakat yang beragam, baik etnis, agama, dan bahkan ras. Belakangan ini isu konflik sosial relatif meningkat, dan bahkan pada bulan September 2010 telah meletus kerusuhan di Tarakan. Terjadi kerusuhan massal yang melibatkan etnis Dayak dan etnis Bugis.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan keterangan dari para informan, memang muncul semacam stereotipe terhadap sentimen etnis, terutama etnis Bugis. Ketegangan hubungan sering muncul yang dipicu persoalan di seputar akses ekonomi dan pergaulan sosial.

Ada beragam reaksi terhadap peristiwa Tarakan, tetapi pada akhirnya tampak jelas bahwa hubungan antarsuku memang tetap menyembunyikan masalah. Dari kalangan aparat keamanan sendiri, berpendapat bahwa kasus kerusuhan Tarakan hanyalah kasus kriminal biasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengeluarkan pernyataan senada. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan, bentrokan di Kota Tarakan tidak terkait etnis tertentu. "Pertikaian yang terjadi di Tarakan bukan terkait suku atau etnis dan ini murni masalah pidana. Saya juga mengimbau seluruh masyarakat di Kaltim agar tidak terprovokasi dengan isu berbau SARA. Sekali lagi saya tegaskan, ini masalah hukum dan bukan pertikaian antarsuku," tandasnya.

Sementara itu beberapa informan menyatakan, bahwa ada baiknya pemerintah juga mengakui secara jujur jika di Kalimantan Timur memang ada potensi konflik yang melibatkan isu etnis. Fakta sosial itu tidak perlu ditutupi, dibuka saja ke publik, toh warga masyarakat juga sudah tahu bahwa peristiwa itu merupakan manifestasi konflik yang disebabkan oleh berkembangnya prasangka. Sebab jika masalahnya ditutup-tutupi nanti penyelesaiannya bersifat semu dan serimonial. "Sebaiknya pemerintah harus jujur, ungkapkan saja apa akar permasalahannya secara jujur kepada publik, jangan ditutup-tutupi, agar



penyelesaiannya dapat tuntas”, kata KV Lie salah seorang warga.

Sedangkan Irmansyah juga mengakui bahwa di Samarinda dan Kaltim pada umumnya memang ada masalah dalam kaitan dengan hubungan antarwarga yang multi etnis. Di Samarinda ini warga-nya bermacam-macam latar belakang sosialnya, juga soal etnis. Orang Bugis Sulawesi sebenarnya sudah menjadi warga Samarinda sejak lama dan tidak ada masalah. Akan tetapi harus diakui, bahwa sudah menjadi rahasia umum jika perilaku etnis Bugis memang berbeda, dan kadang-kadang berlebihan karena mempertahankan citra sebagai etnis yang pantang menyerah. “Mungkin maksudnya ingin menjaga citra bahwa orang Bugis adalah pemberani, tetapi harus diakui kadang-kadang justru sikapnya yang seperti itu sering menimbulkan masalah dalam pergaulan sosial”, kata Irmansyah.

Untuk menjaga kohesivitas sosial masyarakat Samarinda dan Kaltim pada umumnya, hampir semua informan setuju bahwa semangat multikulturalisme perlu digalakkan. Lembaga sosial seperti keluarga dan sekolah adalah sangat penting sebagai wahana sosialisasi multikulturalisme. Menurut Kris Suharyatno, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum yang juga guru Pendidikan Kewargaan SMU Negeri I Samarinda, menjelaskan bahwa multikulturalisme selama ini telah diajarkan di lembaga sekolah.

Untuk terus menjaga kerukunan dalam berkomunitas, nilai-nilai toleransi perlu terus diajarkan pada murid. Sekarang Diknas sendiri telah merancang pendidikan karakter yang di dalamnya ada aspek multikulturalisme. “Harus diakui bahwa sekarang ini wawasan kebangsaan telah mengalami surut. Pancasila tidak lagi populer di kalangan siswa, dan masyarakat pada umumnya. Saya sangat berharap agar Pancasila dikundangkan lagi oleh pemerintah, seperti dulu”. Kata Suharyatno yang didukung Budi Setiawan, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan.

Menurut Suharyatno implementasi penanaman nasionalisme pada murid ia lakukan melalui berbagai kegiatan sekolah, seperti upacara bendera. Di sekolah ini setiap hari senin rutin dilakukan upacara bendera, dan bahkan sering mengambil inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan upacara pada hari-hari penting yang berkaitan

dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Misalnya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober senantiasa menaikkan bendera setengah tiang untuk memperingati tragedi kemanusiaan. Suharyatno juga sering mengajak siswanya untuk berziarah ke taman makam pahlawan, pada momen tertentu agar menghargai jasa pejuang bangsa dalam rangka menguatkan rasa nasionalisme.

Sementara itu Budi Setiawan sering menyelenggarakan pentas seni yang menampilkan kesenian dari berbagai daerah, seperti tari Jawa dan tari Saman dari Aceh. “Murid di sini sangat apresiatif terhadap seni budaya dari daerah lain, terutama tari Saman. Mungkin karena gerakannya yang dinamis, sehingga itu cocok dengan selera anak muda yang gemar dengan musik dinamik”, kata Budi. Semua itu dilakukan demi untuk membangun rasa toleransi dan saling menghormati terhadap berbagai seni budaya daerah di tanah air.

Namun demikian Suharyatno menyayangkan pemberitaan media yang selama ini lebih menonjolkan aspek kekerasan dan kerusuhan. Konflik-konflik sosial sering ditampilkan secara vulgar dan berulang-ulang oleh media televisi, sehingga akan mempengaruhi psikologi siswa. Sementara guru terus melakukan upaya yang konstruktif dalam menanamkan rasa nasionalisme dan pentingnya perdamaian, tetapi media dengan gencar menyiarkan tayangan yang kurang edukatif bagi upaya membangun citra yang baik negeri ini. “Kita para guru berusaha keras untuk mengajarkan pentingnya kerukunan, tetapi televisi terus menyajikan berita tentang pertarungan elite politik. Katanya para orangtua menjadi teladan, tetapi kenyataannya siswa tidak mendapatkannya karena para pemimpinnya ribut terus sebagaimana yang mereka lihat di televisi”, kata Suharyatno.

Harus ada kemauan politik untuk membangun rasa kebanggaan nasional. Sekarang para elite politik harus memberi teladan kepada generasi muda akan pentingnya nilai toleransi, kerukunan, dan nasionalisme. Jika para elite politik ribut terus maka akan dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri bangsa, sehingga bangsa ini semakin tidak jelas mau dibawa ke arah mana. Ideologi Pancasila harus menjadi sumber nilai untuk menjaga kerukunan bangsa dengan semangat multikulturalisme.

> --- Yogyakarta: Barometer Masyarakat Multikultural

Yogyakarta merupakan kota yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Atas predikat menyandang sebagai kota pendidikan itu, kota ini menjadi tujuan pendidikan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan dari berbagai negara. Karena itu kota ini penghuninya datang dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan bahkan ras, sehingga masyarakatnya sangat plural. Bahkan kota ini kemudian sering mendapat sebutan sebagai Indonesia mini karena memang dihuni oleh warga masyarakat yang penuh dengan keberagaman sebagaimana karakter sosio-kultural Nusantara.

Kohesivitas sosial dapat dikatakan masih cukup kuat, meskipun potensi konflik tetap ada. Hanya saja berdasarkan pengamatan lapangan dan keterangan dari beberapa informan, studi lapangan ini menemukan bahwa persoalan keberagaman dan pluralitas Yogyakarta sedang menghadapi arus penyeragaman baru yang bersumber dari gerakan ideologi agama sektarian. "Meskipun semangat multikulturalisme di Yogyakarta ini masih cukup kuat, tetapi dalam sepuluh tahun terakhir ini muncul gejala bahwa dalam kehidupan dan pergaulan sosial yang menjurus sektarian", kata Zuly Qodir, dosen Sekolah Pascasarjana UGM.

Sebagai ilustrasi misalnya di jika dahulu warga masyarakat Yogyakarta tidak pernah memperlakukan rumah kos-kosan dihuni dari berbagai latar belakang etnis dan agama, tetapi sekarang sudah mulai terlihat hanya menerima dari salah satu golongan. Misalnya sudah mulai banyak rumah-rumah kos-kosan yang di depan pintu tertulis "menerima kos muslim", yang dahulu sama sekali hal seperti itu tidak pernah ada. Di Yogyakarta sekarang juga sudah ada perumahan khusus Muslim, dan bahkan di beberapa kampung sudah mulai mempersoalkan makam khusus muslim. Selama ini makam di Yogyakarta tidak pernah membedakan latar belakang agama, tetapi atas dasar domisili dan kewargaan.

Gejala seperti itu menurut Muhaimin, pengurus

Forum Kerukunan Umat Beragama Yogyakarta, karena belakangan memang muncul gerakan-gerakan Islam radikal yang ingin memaksakan kehendak dan anti budaya lokal. Gerakan yang sering dikenal sebagai *Wahabian*, yang orientasinya kebudayaan Arab sebagaimana yang diidealkan oleh gerakan radikal terimplementasi di Yogyakarta. Sementara di Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki semangat multikulturalisme yang kuat. Sebagai contoh misalnya, bahwa selama ini warga Jogja tidak pernah memperlakukan latar belakang etnis dan agama. "Adanya Forum Umat Beragama dimaksudkan untuk menjaga agar Yogyakarta tetap sebagai masyarakat yang warganya menjunjung tinggi toleransi, pluralis, dan menghargai perbedaan", tandasnya.

Sementara itu Heru Nugroho, guru besar Sosiologi UGM menjelaskan bahwa keberagaman di Yogyakarta masih tetap terjaga dan sepertinya tetap menjadi barometer masyarakat multikultural. Di tengah maraknya etnosentrisme di berbagai daerah pasca pemerintahan Orde Baru, Yogyakarta tetap menjaga semangat pluralisme dan multikulturalisme. "Di UGM misalnya, tidak ada masalah jabatan-jabatan struktural strategis seperti rektor dan wakil-wakilnya dijabat oleh orang dengan latar belakang etnis yang bukan Jawa. T Jacob dan Sofyan Effendy adalah orang luar Jawa yang pernah menjadi rektor UGM. Demikian pula mantan Bupati Bantul, Idham Samawi misalnya, kalau dirunut dia adalah etnis Minang, dan warga Yogyakarta tidak pernah memperlmasalahkannya", katanya.

Sebagai barometer masyarakat multikultural, Yogyakarta memiliki sejarah menarik dalam mengelola konflik budaya yang mengarah pada peningkatan produktivitas peradaban. Jogja hingga sekarang mempunyai semangat revalitas dengan Surakarta, yang mewujud dalam kompetisi budaya antara *gagrag* Mataram yang merepresentasikan Jogaja dan *gagrag* Surakarta. Konflik itu termanifestasi pada berbagai produk budaya seperti wayang, pakaian adat, musik gamelan dan lain-lain, yang antara *gagrag* Jogja



dan Surakarta memiliki perbedaan karakter. Kompetisi kultural tersebut ternyata menjadi produktif karena masing-masing bukan saja melestarikan karya peradaban, tetapi juga terus melakukan inovasi dengan semangat perbedaan karakter masing-masing.

Ilustrasi tersebut dapat menjadi contoh bagaimana suatu perbedaan ternyata mampu mendorong peningkatan produktivitas karya peradaban. Keduanya tetap terlibat dalam kompetisi kultural, tetapi dengan menjaga saling menghormati dan mengakui perbedaan masing-masing dengan terus berinovasi. Semua itu menjadi bukti bahwa semangat multikulturalisme telah mampu mendorong dan menjadi semangat dalam penciptaan peradaban dengan keduanya tetap mempertahankan karakternya tanpa keduanya harus saling menghancurkan.

> --- Penutup

Mencermati dinamika sosial dan politik di daerah-daerah, studi lapangan ini menemukan berbagai permasalahan di seputar isu multikulturalisme, sebagai berikut:

- Ketika pemerintah memberlakukan Otonomi Daerah sejak tahun 2001, maka konstelasi pemerintahan di daerah mengalami perubahan secara cukup signifikan. Jika sebelumnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan bersifat sentralistik, maka sejak itu kekuasaan menjadi terdesentralisasi ke daerah-daerah dengan Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan. Bersamaan dengan itu, sistem pemilihan umum secara langsung yang dikenal sebagai Pemilu Kepala Daerah mendorong dinamika politik lokal menjadi semakin meninggi. Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, Otda semakin menguatkan gejala politik identitas yang berakar pada etnisitas dalam arti geneologis. Isu putra daerah pun menjadi santer mengiringi dinamika politik lokal di era otonomi daerah. Gejala penguatan identitas lokal yang bersandar pada etnis ini memiliki implikasi terhadap melemahnya identitas nasional dalam konteks Indonesia yang multikultural.

- Seringkali kita mendengar jika ada

orang menanyakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia, maka jawabnya adalah Pancasila. Dengan kata lain, ada semacam konsensus Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Akan tetapi pada era demokratisasi ini Pancasila justru menjadi tidak populer, dan bahkan cenderung dilupakan, sehingga banyak yang menilai bangsa ini sedang mengalami krisis identitas atau jati diri. Mengapa Pancasila sekarang tidak mampu menjadi identitas diri bangsa di tengah arus perubahan masyarakat? Banyak yang sepakat bahwa munculnya konflik-konflik bernuansa SARA belakangan ini karena orang sudah melupakan Pancasila sebagai fondasi masyarakat multikultural.

- Semua agama pada prinsipnya mengajarkan untuk menghargai perbedaan yang bersumber dari ajaran kitab suci. Akan tetapi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir agama justru menjadi masalah dalam membangun masyarakat plural. Berbagai konflik yang berlatar belakang agama kerap kali muncul, dan yang paling manifes adalah konflik Ambon dan Poso. Selanjutnya konflik di berbagai wilayah juga terjadi meskipun hanya bersifat sporadis, seperti penyerangan rumah-rumah ibadah yang dipicu oleh masalah perizinan. Bahkan konflik sering kali terjadi di lingkungan seagama sendiri, misalnya konflik antaraliran atau antarsekte yang berupa penghancuran rumah ibadah. Belakangan juga muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan mengklaim dirinya paling benar, dan melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Semua itu menyebabkan goyahnya nilai toleransi dan rasa persatuan sebagai bangsa.

- Sudah selayaknya jika sistem pendidikan nasional mengadopsi pendekatan multikulturalisme ini sebagai spirit utama dalam membangun peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mozaik, yang terdiri dari beragam etnis, agama, golongan, dan kebudayaan. Dengan kata lain, keragaman budaya, agama, dan etnis serta berbagai variasinya dalam suatu masyarakat adalah kenyataan sejarah Indonesia. Sistem pendidikan nasional mesti sensitif terhadap masalah keberagaman, karena posisinya sangat strategis dalam membangun watak bangsa yang tidak sektarian, tetapi toleran, demokratis, dan humanistik. Pendidikan yang disemangati



oleh multikulturalisme sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apresiasi dan saling hormat-menghormati terhadap perbedaan harus dibentuk dari tingkat paling dini dalam kehidupan anak. Akan tetapi penerapan pendidikan multikultural di sekolah bukanlah hal yang mudah.

- Media mempunyai fungsi tanggung jawab sosial dalam upaya membangun masyarakat multikultural yang demokratis. Melalui kemampuannya dalam menyebarkan informasi dan sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat, media berperan penting menyebarkan dan menanamkan kesatuan dalam keberagaman (*unity in diversity*). Berbagai pesan informasi yang disampaikan bisa merupakan ekspresi masyarakat yang memiliki keberagaman baik dari latar belakang budaya, agama, sosial-ekonomi, dan ideologi politik. Akan tetapi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini, ada kecenderungan menjadi media partisan. Setiap organisasi masyarakat dan organisasi politik masing-masing mempunyai media sendiri-sendiri. Bahkan beberapa media cetak yang memiliki wilayah edar cukup menasional pun ada yang bias agama dan aliran politik. Tentu saja kecenderungan seperti itu kurang kondusif untuk membangun masyarakat multikultural.

Berdasarkan beberapa temuan di atas, menjadi semakin penting bagaimana membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia merupakan negara yang karakter utamanya adalah plural. Sosialisasi multikulturalisme menjadi penting untuk dilakukan terus menerus mengingat potensi konflik yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa tetap ada. Oleh karena itu berbagai elemen harus memiliki komitmen kuat dalam membangun dan memperkuat sendi-sendi kesatuan bangsa melalui spirit multikulturalisme menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan demokratis.



